

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERAMBAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG ILE WUUNG (STUDI KASUS DESA WULUBLOLONG, KECAMATAN SOLOR TIMUR, KABUPATEN FLORES TIMUR)

Ade Irma Syamsudin, Nixon Rammang*, Norman P. L. B Riwu Kaho**, Fadlan
Pramatana***

Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Universitas Nusa Cendana

Email : irmasyamsudin7@gmail.com

Abstrak

Perambahan kawasan hutan lindung merupakan salah satu permasalahan yang mengancam kelestarian fungsi ekologis hutan serta keberlanjutan sumber daya alam. Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung di Desa Wulublolong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur mengalami tekanan akibat aktivitas masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambahan hutan di Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, serta analisis data spasial menggunakan citra satelit Google Earth, Google Earth Engine, dan Global Forest Watch (GEW). Responden penelitian terdiri atas 50 masyarakat pelaku perambahan serta informan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan analisis frekuensi, persentase, tematik dan analisis geospasial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perambahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya perambahan hutan, yang ditandai oleh rendah dan tidak stabilnya pendapatan masyarakat serta tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian. Selain itu, faktor sosial berupa sistem kepemilikan lahan secara turun-temurun, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi serta status kawasan hutan lindung, keterbatasan lahan pertanian, serta kurang optimalnya sosialisasi dan pengawasan turut mendorong terjadinya perambahan. Analisis citra satelit tahun 2015, 2023, dan 2025 menunjukkan adanya dinamika perubahan tutupan hutan yang mengindikasikan bahwa perambahan berlangsung mengikuti tekanan sosial ekonomi dan kebutuhan lahan masyarakat.

Kata Kunci: Perambahan Hutan, Hutan Lindung Ile Wuung, Faktor Penyebab, Sosial Ekonomi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan tropis yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan menjadi sumber interaksi antara manusia, makhluk hidup lain, serta elemen alam (Raharja 2018 dalam Wijayanti et al., 2023). Dampak dari aktivitas ini sangat signifikan terhadap keberlanjutan hutan. Hutan mengalami penurunan tutupan akibat pembangunan, penambangan, 1 penebangan liar, dan perambahan. Berdasarkan analisis Global Forest Watch dari tahun 2001 hingga 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalami kehilangan tutupan pohon sebesar 147,5 ribu Ha, terdiri dari 6,54 ribu Ha akibat kebakaran dan sekitar 141 ribu Ha karena penyebab lainnya. Pada tahun 2023, kehilangan tutupan pohon akibat kebakaran mencapai 555 Ha, atau sekitar 6,3% dari total kehilangan tahunan. Lebih lanjut, dari tahun 2021 hingga 2024, sekitar 100% kehilangan tutupan pohon terjadi di kawasan hutan alam, menghasilkan emisi karbon lebih dari 1 juta ton CO₂, menunjukkan tekanan yang signifikan terhadap ekosistem hutan alami. Wilayah Flores Timur, kehilangan tutupan pohon selama periode 2001–2023 tercatat sebesar 14,2 ribu Ha, yang menyumbang 7,2% dari total tutupan pohon tahun 2000 seluas 198 ribu Ha. Dari total kehilangan ini, sekitar 85 Ha merupakan kehilangan hutan primer yang masih tersisa (GFW, 2024).

Pada tahun 2004, wilayah Flores Timur mencatat lahan kritis seluas 167.209 Ha, terdiri dari 62.389 Ha dalam kawasan hutan dan 104.820 Ha di luar kawasan hutan, dengan penyebab utama kerusakan meliputi kebakaran hutan, eksploitasi sumber daya secara tidak berkelanjutan, dan penyerobotan kawasan hutan. Pada tahun yang sama, terjadi kebakaran hutan terbesar seluas 1.100 Ha, serta 285 Ha kawasan hutan tercatat diserobot.

Menjelaskan berdasarkan pengamatan di lapangan, Sebagian Kawasan hutan lindung Desa Wulublolong telah diahlifungsi menjadi Kawasan pemukiman, Pembangunan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pembukaan lahan pertanian. Desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan memiliki potensi besar bagi penduduk setempat untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan hasil hutan.

Banyak faktor yang menyebabkan perambahan hutan, namun hingga kini belum ada analisis yang secara khusus mengkaji faktor-faktor tersebut di Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung. Menurut Ria et al., (2023) bahwa “Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat merambah adalah faktor ekonomi, faktor sosial, tingkat kesadaran masyarakat dan keterbatasan Jumlah pengawas keamanan hutan. Kawasan HL Ile Wuung berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DLHK NTT), yang melaksanakan tugasnya melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH). Di Provinsi NTT terdapat 22 UPT KPH yang terbagi di tiap kabupaten/kota, dan seluruhnya bertanggung jawab atas pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi menurut Peraturan Gubernur NTT No. 90 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri LHK No. 664/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 (Kesatuan Pengelolaan Hutan, 2025). Melihat peran regulasi HL dan pengelolaan yang dilakukan oleh DLHK NTT melalui UPT KPH, menjadi penting untuk melakukan penelitian “Analisis Faktor-Faktor Perambahan di Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung (Studi Kasus Desa Wulublolong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur)”. Bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perambahan dan memahami dampaknya dalam konteks fungsi ekologis kawasan HL serta

mekanisme pengawasan dan mitigasi yang dijalankan oleh UPT KPH setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perambahan hutan di Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung. Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner kepada 50 masyarakat perambah hutan dan dianalisis menggunakan frekuensi serta persentase, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dan dianalisis secara tematik. Selain itu, data spasial berupa citra Landsat 8 OLI/TIRS dan data dari Global Forest Watch dianalisis secara deskriptif-geospasial untuk menggambarkan kondisi dan perubahan tutupan vegetasi serta lokasi perambahan. Ketiga sumber data tersebut kemudian diinterpretasikan secara terpadu untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perambahan hutan, faktor penyebab, dan peran pemerintah dalam pengendaliannya.

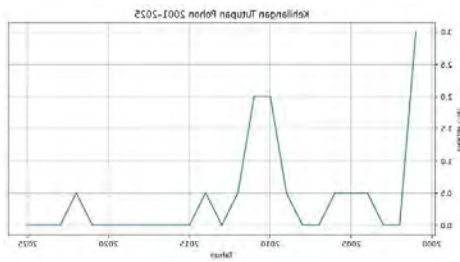
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung merupakan salah satu kawasan hutan yang berada di kabupaten Flores Timur yang dikelola dalam wilayah UPTD KPH Wilayah Flores Timur. Hutan Lindung Ile Wuung secara administratif berada pada dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Solor Timur dan Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Secara pengelolaan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat mengelola sekitar 14 kawasan hutan yang terdiri dari berbagai fungsi, yaitu Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Tetap (HPT), serta kawasan hutan yang telah terindikasi atau mengalami perubahan fungsi. Desa Wulublolong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Secara

geografis, desa ini memiliki luas wilayah sekitar 200 Ha dengan karakteristik topografi berupa dataran rendah hingga perbukitan ringan.

1. Perambahan Kawasan Hutan Lindung di Desa Wulublolong

Perambahan kawasan hutan di Desa Wulublolong ditemukan dalam bentuk pembukaan lahan untuk aktivitas perkebunan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan selama penelitian, area yang berada di dalam kawasan hutan sebagian besar dimanfaatkan warga sebagai lahan perkebunan untuk menanam tanaman produktif, seperti jagung, padi, dan jambu mente. Aktivitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS, kondisi tutupan vegetasi di Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung pada tahun 2015, 2023, dan 2025 menunjukkan adanya perbedaan kenampakan visual. Perbedaan tersebut terlihat dari variasi rona, tingkat kehijauan vegetasi, serta kondisi tutupan awan pada masing-masing citra. Citra yang digunakan merupakan citra Landsat 8 OLI/TIRS Collection 2 Level-2 Surface Reflectance yang di akuisisi pada tanggal 8 Mei 2026. Perbedaan tampilan visual antar citra tidak dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai adanya penurunan maupun pemulihan tutupan hutan. Hal ini karena kenampakan vegetasi pada citra satelit dipengaruhi oleh waktu perekaman, kondisi atmosfer, tutupan awan, serta musim pada saat citra diakuisisi.



Gambar 1. Grafik Kehilangan Tutupan Pohon di Kawasan Hutan Lindung Ile

Wuung Desa Wulublolong (diperoleh dari *Global Forest Watch* tahun 2001-2025) Data pada grafik 4.6 menunjukkan adanya fluktuasi kehilangan tutupan pohon yang cukup tajam, dengan lonjakan paling signifikan terjadi pada tahun 2001, 2010 hingga 2011. Peningkatan drastis tersebut mengindikasikan adanya aktivitas pembukaan lahan skala besar yang melampaui rata-rata tahunan pada dekade sebelumnya. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang karena hilangnya vegetasi dalam skala luas di kawasan penyangga akan secara langsung mengurangi kemampuan hutan dalam menjalankan fungsi ekologisnya, terutama dalam menjaga siklus hidrologi dan mencegah terjadinya bencana tanah longsor di area berbukit. Selain melalui grafik batang, sebaran spasial kerusakan hutan dapat diidentifikasi secara visual menggunakan peta interaktif guna melihat titik-titik lokasi yang paling terdampak. Peta kehilangan tutupan pohon memberikan indikasi mengenai arah perambahan yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung, apakah terpusat pada area tertentu atau menyebar di sepanjang batas kawasan. Dengan mengintegrasikan data spasial dari

Global Forest Watch, dapat dianalisis sejauh mana infiltrasi aktivitas manusia telah masuk ke dalam zona inti hutan lindung dalam rentang waktu dua dekade terakhir.

Konsentrasi kehilangan vegetasi terlihat cukup signifikan pada beberapa bagian lereng gunung, yang jika dibiarkan akan memperluas fragmentasi hutan dan menurunkan kualitas ekosistem secara keseluruhan. Data spasial ini menjadi dasar yang kuat bagi pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas wilayah rehabilitasi serta memperketat pengawasan pada area-area yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan perambahan yang tinggi. Data dari *Global Forest Watch* menunjukkan bahwa luas kehilangan tutupan pohon sebesar 1,7 ha dan perubahan tutupan lahan lainnya sebesar 1,5 ha merupakan luas perubahan yang terjadi pada tahun 2010 di dalam area penelitian. Angka tersebut bukan menunjukkan luas area penelitian, melainkan besarnya perubahan tutupan lahan yang terdeteksi pada tahun pengamatan. Seluruh analisis *Global Forest Watch* dan *Google Earth Engine* dilakukan menggunakan *Area of Interest (AOI)* yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode tersebut, kawasan hutan masih memiliki dominasi vegetasi yang cukup signifikan, namun juga telah terdapat area terbuka atau penggunaan lahan lain yang mencapai hampir separuh dari total wilayah observasi. Di sisi lain, upaya pemulihan atau penambahan tutupan pohon (*tree cover gain*) tercatat sangat minim, di mana dari tahun 2000 hingga 2020 hanya terdapat penambahan seluas 1,0 ha. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,0% jika dibandingkan dengan garis dasar tutupan pohon pada tahun 2000. Minimnya angka pemulihan ini, apabila dikaitkan dengan tren kehilangan tutupan pohon yang fluktuatif pada tahun-tahun sebelumnya,

mempertegas adanya ketimpangan antara laju kerusakan hutan dan upaya regenerasi vegetasi di Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung.

2. Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Hutan

Kependudukan

Berdasarkan hasil survei terhadap 50 responden masyarakat Desa Wulublolong yang berada di sekitar Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung, dapat diketahui bahwa karakteristik sosial ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik pemanfaatan dan perambahan kawasan hutan. Kondisi ini terlihat dari struktur pekerjaan, tingkat pendidikan, pola pendapatan, hingga sistem penguasaan lahan yang berlaku di masyarakat. Secara demografis, responden penelitian didominasi oleh penduduk usia produktif hingga lanjut usia, dengan rentang umur yang sebagian besar berada di atas 40 tahun

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini menggambarkan kondisi sosial dasar masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung, khususnya di Desa Wulublolong. Karakteristik ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta struktur umur responden.

a. Jenis Kelamin

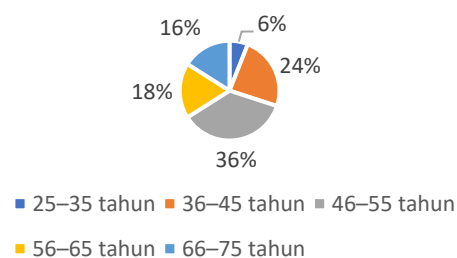
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan adanya perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan gambar 4.8, diketahui bahwa responden laki-laki

berjumlah 33 orang atau 66%, sedangkan responden perempuan berjumlah 17 orang atau 34%. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan perambahan kawasan hutan lebih dominan dibandingkan perempuan. Kondisi ini juga mencerminkan pembagian peran kerja dalam rumah tangga masyarakat, di mana laki-laki lebih banyak terlibat dalam aktivitas produksi di luar rumah.

b. Umur

Struktur umur responden menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi sampel penelitian terdiri dari berbagai kelompok usia, mulai dari usia muda hingga lanjut usia. Hal ini penting untuk melihat variasi pengalaman, peran sosial, serta tingkat keterlibatan dalam aktivitas pemanfaatan lahan hutan.

Karakteristik Umur Responden Masyarakat Perambah Hutan

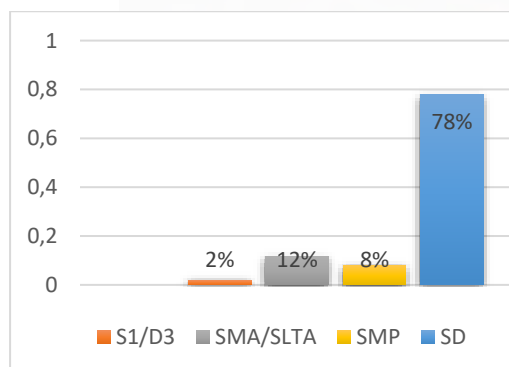


Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Berdasarkan kelompok umur, masyarakat perambah hutan di Desa Wulublolong didominasi oleh usia produktif hingga usia lanjut. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas pengelolaan lahan di kawasan hutan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat usia dewasa yang telah lama bergantung pada sektor pertanian

dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian utama.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan masyarakat dalam memahami informasi, termasuk terkait batas kawasan hutan dan fungsi ekologisnya. Rendahnya tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap minimnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi kehutanan.



Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Siburian, 2004) yang menunjukkan menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan perambahan hutan umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, sehingga pemahaman mengenai fungsi kawasan hutan dan dampak perambahan masih terbatas.

d. Mata Pencaharian

Berdasarkan data penelitian terlihat bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai petani, yaitu sebanyak 41 orang atau 82%. Selain itu, terdapat responden yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), ojek, pedagang sebanyak 2 orang atau 4%. Sisanya tersebar

pada pekerjaan lain seperti, perangkat desa, tukang, dan pekerjaan informal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada sektor pertanian, yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan.

e. Luas Garapan Lahan

Kepemilikan lahan merupakan salah satu aspek penting dalam memahami pola pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung. Status kepemilikan lahan tidak hanya mencerminkan aspek legalitas penguasaan tanah, tetapi juga berkaitan erat dengan pola pewarisan, sistem adat, serta strategi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui pengelolaan lahan. Berdasarkan luas garapan di dalam kawasan hutan, sebagian besar responden memiliki luas lahan antara 500–1.000 m² dengan jumlah 17 orang atau 34%. Selanjutnya, responden yang memiliki luas lahan 1.001–2.000 m² sebanyak 13 orang atau 26%, sedangkan luas lahan kurang dari 500 m² sebanyak 12 orang atau 24%. Adapun responden yang memiliki luas garapan lebih dari 2.000 m² sebanyak 8 orang atau 16%. Temuan ini sejalan dengan klasifikasi (Mandang et al., 2020) yang membagi tiga kategori petani berdasarkan luas lahan yang dikelola, yaitu petani berskala kecil untuk lahan <1 ha, petani berskala menengah untuk lahan 1–3 ha, dan petani berskala besar untuk lahan >3 ha. Berdasarkan kategori tersebut, mayoritas responden (84%) di Desa Wulublolong tergolong petani

berskala kecil karena mengelola lahan di bawah 0,2 ha untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan perkebunan keluarga.

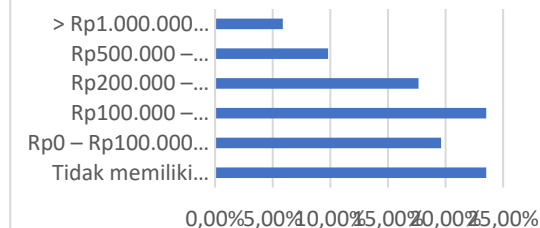
3. Faktor Perambah Hutan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 50 responden masyarakat Desa Wulublolong yang berada di sekitar Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung, dapat diidentifikasi bahwa aktivitas perambahan hutan tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun pengetahuan masyarakat terhadap kawasan hutan.

a. Faktor Ekonomi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendapatan yang sangat rendah dan tidak stabil, yaitu berkisar antara Rp50.000 hingga Rp500.000 per bulan terkadang ada yang mendapatkan > Rp.1.000.000 tapi sifatnya fluktuatif/musiman saja namun secara garis besar pendapatan masyarakat dibawah rata rata standar hidup layak, bahkan terdapat responden yang tidak memiliki pendapatan tunai karena hasil kebun hanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Kondisi ekonomi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari sumber penghidupan tambahan melalui pemanfaatan lahan di kawasan hutan.

Tingkat Pendapatan Masyarakat Per-Bulan



Gambar 4. Tingkat Pendapatan Responden

b. Faktor Sosial dan Sistem Warisan Lahan

Hal ini sejalan dengan temuan (Raharja et al., 2024)) yang menyatakan bahwa hubungan sosial, budaya lokal, dan sistem pewarisan hak atas lahan memiliki pengaruh besar terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Kepemilikan lahan yang diwariskan secara turun-temurun menciptakan ikatan sosial dan rasa memiliki yang kuat, sehingga masyarakat memandang pengelolaan lahan sebagai bagian dari hak adat dan hak keluarga. Akibatnya, sistem pewarisan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme alih kepemilikan antargenerasi, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial masyarakat dalam mempertahankan dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan.

c. Rendahnya dan Sosialisasi Kawasan Hutan

Sebagian besar responden menyatakan tidak mengetahui batas kawasan hutan secara jelas, bahkan ada yang tidak menyadari bahwa wilayah yang mereka garap merupakan kawasan hutan lindung. Selain itu, meskipun terdapat responden yang pernah mengikuti sosialisasi mengenai

fungsi hutan, namun jumlahnya tidak merata dan sebagian menyatakan tidak memahami isi sosialisasi secara utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penyadaran dan edukasi terkait fungsi konservasi hutan belum berjalan optimal. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai fungsi ekologis hutan dan aturan pengelolaan kawasan hutan.

- d. Faktor Kebutuhan Lahan dan Ketergantungan pada Pertanian
Keterbatasan lahan produktif di luar kawasan hutan menyebabkan sebagian masyarakat memperluas lahan garapan ke dalam Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung. Pola pemanfaatan lahan yang masih bersifat subsisten juga menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian sebagai sumber penghidupan, sehingga tekanan terhadap kawasan hutan menjadi sulit dihindari. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya perambahan hutan, terutama karena rendah dan tidak stabilnya pendapatan masyarakat. Selain itu, faktor sosial berupa sistem kepemilikan lahan secara turun-temurun serta rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi serta status kawasan hutan semakin memperkuat kecenderungan masyarakat untuk membuka lahan di kawasan lindung.
- e. Pola Waktu Aktivitas dan Intensitas Perambahan
Berdasarkan hasil analisis kuesioner, dapat disimpulkan bahwa faktor perambahan di

Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung merupakan kombinasi dari faktor ekonomi, sosial, budaya, keterbatasan lahan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas dan fungsi kawasan hutan. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, namun diperkuat oleh legitimasi sosial berupa sistem warisan lahan dan minimnya pengetahuan formal mengenai status kawasan hutan. Dengan demikian, perambahan hutan di Desa Wulublolong tidak dapat dilihat hanya sebagai pelanggaran, tetapi juga sebagai fenomena sosial-ekonomi yang kompleks yang membutuhkan pendekatan penanganan yang bersifat struktural dan partisipatif.

4. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung memiliki posisi yang sangat penting dalam mengendalikan dinamika perambahan hutan di Desa Wulublolong. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari unsur pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Flores Timur, diketahui bahwa aktivitas perambahan mulai menunjukkan intensitas yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Periode tersebut terutama terjadi sejak tahun 2019 hingga 2025, ketika tekanan masyarakat terhadap lahan hutan semakin meningkat. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat terhadap lahan pertanian untuk menunjang kehidupan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah dipandang sebagai aktor utama yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara fungsi

konservasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam merespon fenomena tersebut, pemerintah melalui KPH telah melakukan berbagai upaya kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah desa, kecamatan, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan hutan. Selain itu, kolaborasi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya perluasan aktivitas perambahan yang tidak terkendali. Pemerintah berupaya membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan. Dalam praktiknya, pendekatan kolaboratif ini menjadi salah satu strategi utama dalam pengelolaan hutan berbasis sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan banyak aktor dalam pengelolaan kawasan hutan. Berdasarkan hasil wawancara, KPH Flores Timur memiliki wilayah kerja seluas 51.864 ha, sedangkan jumlah Polisi Kehutanan yang tersedia hanya 2 orang. Perbandingan antara luas wilayah kerja dan jumlah personel tersebut menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas

pengawasan di lapangan. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap frekuensi patroli. Hasil wawancara menunjukkan bahwa patroli pengamanan hutan dilakukan sangat jarang. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran dan sarana transportasi. Informasi dari KPH menunjukkan bahwa selama sekitar lima tahun terakhir, anggaran untuk patroli pengamanan hutan sangat minim, bahkan terdapat periode ketika anggaran tersebut tidak tersedia.

Dari aspek sosialisasi, kegiatan kepada masyarakat tercatat dilakukan satu kali pada tahun 2026. Frekuensi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan preventif melalui penyampaian informasi mengenai fungsi, batas, dan aturan kawasan masih terbatas.

Dari aspek penanganan pelanggaran, terdapat satu kasus/teguran yang tercatat berdasarkan informasi KPH. Jumlah tersebut perlu dibaca dalam konteks keterbatasan pengawasan dan bukan semata-mata sebagai indikator rendahnya aktivitas perambahan.

Pemerintah juga telah mengembangkan pendekatan melalui Perhutanan Sosial. Berdasarkan informasi KPH, terdapat 32 kelompok yang telah memperoleh SK Perhutanan Sosial, sedangkan 7 kelompok masih berada pada tahap verifikasi administrasi. Program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan apabila disertai pendampingan, kepastian akses,

dan pengawasan pemanfaatan lahan.

Dengan demikian, pengendalian perambahan membutuhkan kombinasi pendekatan preventif, pengawasan, penegakan aturan, dan penyediaan alternatif akses kelola. Kondisi di Ile Wuung menunjukkan bahwa keterbatasan personel, anggaran, transportasi, dan intensitas sosialisasi masih menjadi faktor kelembagaan yang perlu diperkuat.

SIMPULAN

Perambahan hutan di Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu rendah dan tidak stabilnya pendapatan masyarakat. Faktor sosial dan pendidikan turut mendorong perambahan, seperti sistem kepemilikan lahan turun-temurun serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan status kawasan hutan. Perambahan berlangsung berulang mengikuti musim tanam dan dipengaruhi berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan sehingga memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Analisis citra satelit tahun 2015, 2023, dan 2025 menunjukkan dinamika perubahan tutupan hutan di Kawasan Hutan Lindung Ile Wuung. Tahun 2015 memiliki luas vegetasi terkecil, lalu mengalami peningkatan signifikan pada 2023 menjadi terluas, mengindikasikan adanya pemulihan vegetasi. Pada 2025 terjadi stabilisasi dengan sedikit penurunan dari 2023, namun tekanan terhadap kawasan masih ada. Hal ini menunjukkan perambahan tidak terjadi konstan, melainkan mengikuti dinamika sosial ekonomi masyarakat dan tekanan lahan, sehingga citra satelit memberikan

gambaran temporal penting untuk memahami pola perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T. S., Ihsan, K. T. N., & Masse, D. C. . (2021). Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh untuk Analisis Pengaruh Deforestasi Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(2), 29–42.
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2).
- Azzahro, I. A. R., & Sofro, A. (2023). Regresi Robust Untuk Pemodelan Deforestasi di Indonesia. *MATHunesa Jurnal Ilmiah Matematika*, 11(3).
- Dako, Xaverius, F., Purwanto, R. H., Farida, L. R. W., & Sumardi. (2019). Kerusakan Antropogenik Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau Dan Upaya Penanggulangannya Di Pulau Timor Bagian Barat. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(2).
- Deni, D. (2011). Analisis Perambahan Hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Studi Kasus Desa Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus). *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.22146/jik.578>
- Dhaka, Rema, Y., Leksono, A. S., & Suprayitno, D. (2017). Analisis Dan

- Dampaknya Secara Ekonomi, Ekologi Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan Di Kawasan Cagar Alam Watu Ata Kecamatan Bajawa. *Konservasi Sumberdaya Hutan Jurnal Ilmu Ilmu Kehutanan*, 1(4), 51–58.
- Diantoro, S. (2011). Dampak Perambahan Hutan terhadap Kelestarian Kawasan Hutan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 8(2), 45–52.
- Global Forest Watch. (2024). Tutupan Pohon di Flores Timu. Global Forest Watch.
- Hairiah, K., Dewi, S., Agus, F., Velarde, S., Ekadinata, A., & Rahayu, S. (2011). Pengukuran karbon tersimpan di berbagai macam penggunaan lahan. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) - SEA Regional Office.
- KLHK, M. L. H. dan K. R. I. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan., 2021.
- Prawiyogi, Giri, A., Sadih, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar.
- Prudensius, M. (2014). Kekuasaan yang Bekerja Melalui Perlawanan: Kasus Penguasaan Hutan oleh Masyarakat dan Perusahaan. *Antropologi Indonesia*, 34(2).
- Purnomo, P. E., & Anand, P. (2014). The conflict of forest tenure and the emergence of community-based forest management in Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 5(1), 20–31.
- Raharja, A. G. D. B., Baiquni, M., & Setiadi, S. (2024). Forest As a Living Space: Rulership and Management in the Tenganan Pegringsingan Customary Forest, Karangasem Regency, Bali. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 18(1), 90–104.
- Raharja, I. F. (2018). Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat. *Jurnal Selat*, 6, 1–18.
- Seran, A. A. J. J. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perambahan Di Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perambahan Di Kawasan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Sisimeni Sanam
- Watch, G. F. (2024a). Kehilangan Hutan Primer Di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Global Forest Watch.
- Watch, G. F. (2024b). Kehilangan tutupan pohon oleh pendorong dominan di Flores Timu. Global Forest Watch.

